

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PUBLIKASI DAN REALISASI ANGGARAN DANA DESA (STUDI KASUS PADA KANTOR DESA ABIANSEMAL)

Gusti Ayu Kusuma Putri, Nengah Widya Utami, I Made Dwi Hita Darmawan

Sistem Informasi Akuntansi, Universitas Primakara

Jalan Tukad Badung No. 135, Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali.

kusumaputri2101@gmail.com

ABSTRAK

Publikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Abiansemal saat ini masih dilakukan secara manual melalui papan pengumuman fisik, sehingga akses informasi bagi masyarakat menjadi terbatas dan transparansi belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merancang sistem informasi publikasi dan realisasi anggaran dana desa agar informasi anggaran dapat diakses secara lebih luas dan diperbarui secara real-time. Metode pengembangan yang digunakan adalah metode Prototype, yang memungkinkan perbaikan sistem dilakukan secara iteratif berdasarkan masukan dari pengguna. Perancangan sistem dimodelkan menggunakan Data Flow Diagram (DFD) dan Entity Relationship Diagram (ERD), sedangkan rancangan antarmuka pengguna dibuat menggunakan Figma. Evaluasi usability sistem dilakukan dengan menggunakan System Usability Scale (SUS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rancangan awal sistem memperoleh skor SUS sebesar 50, yang termasuk dalam kategori tidak dapat diterima, sehingga diperlukan perbaikan desain yang berfokus pada kebutuhan pengguna. Setelah dilakukan perbaikan pada iterasi kedua, skor SUS meningkat menjadi 82, yang berada pada kategori dapat diterima (Grade B) dan menunjukkan bahwa sistem memiliki tingkat usability yang baik. Rancangan akhir sistem mengintegrasikan peran Admin, Kepala Desa, dan Masyarakat dalam mendukung pengelolaan dan publikasi anggaran desa yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel.

Kata kunci : *Sistem Informasi, Anggaran Dana Desa, Metode Prototipe, Skala Kegunaan Sistem, Berbasis Web.*

1. PENDAHULUAN

Penerapan otonomi daerah di Indonesia memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam kerangka tersebut, desa sebagai entitas pemerintahan terkecil memiliki hak dan kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan lokal, termasuk pengelolaan keuangan desa, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa [1]. Salah satu wujud implementasi otonomi desa adalah pengelolaan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan dana desa wajib dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa [2].

Transparansi anggaran dana desa merupakan prinsip keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai seluruh proses pengelolaan keuangan desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban [3]. Transparansi bertujuan agar masyarakat dapat mengakses dan memahami penggunaan dana desa secara jelas, sehingga mendorong partisipasi publik serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah desa. Penerapan prinsip ini

diharapkan mampu mencegah penyalahgunaan dana, memperkuat kepercayaan publik, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Urgensi transparansi pengelolaan dana desa tercermin dari berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan, salah satunya kasus di Desa Napalakura, Kecamatan Napabalan, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, di mana masyarakat melakukan penyegelan kantor desa akibat dugaan pengelolaan anggaran dan Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinilai tidak transparan.

Publikasi dan realisasi anggaran dana desa merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 secara tegas mewajibkan pemerintah desa untuk menginformasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada masyarakat melalui media yang mudah diakses. Namun, dalam praktiknya, publikasi anggaran di banyak desa masih dilakukan secara konvensional melalui papan pengumuman fisik atau laporan cetak, sehingga jangkauan dan aksesibilitas informasi menjadi terbatas. Kondisi tersebut juga terjadi di Kantor Desa Abiansemal, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, di mana publikasi anggaran dana desa masih dilakukan secara manual. Meskipun telah memenuhi ketentuan formal, metode ini dinilai belum optimal karena keterbatasan jangkauan informasi, terutama bagi masyarakat yang tidak dapat hadir langsung ke kantor desa atau mengikuti pertemuan desa [4]. Hal ini berbeda dengan

beberapa desa lain yang telah memanfaatkan sistem digital dalam publikasi anggaran sehingga mampu meningkatkan transparansi, efektivitas pembangunan, serta kualitas pelayanan publik.

Keterbatasan metode publikasi tersebut menunjukkan perlunya suatu sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung publikasi dan realisasi anggaran dana desa secara lebih efektif. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pemanfaatan sistem berbasis web menjadi solusi strategis untuk memperluas jangkauan informasi, meningkatkan kemudahan akses, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem publikasi dan realisasi anggaran dana desa yang berjalan di Desa Abiansemai serta merancang sistem informasi publikasi dan realisasi anggaran dana desa berbasis web. Perancangan sistem dilakukan menggunakan metode prototype dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi literatur. Proses analisis dan perancangan sistem dimodelkan menggunakan Diagram Konteks, Data Flow Diagram (DFD), Entity Relationship Diagram (ERD), relasi antar tabel, serta perancangan antarmuka pengguna (user interface) menggunakan Figma. Penelitian ini dibatasi pada tahap analisis dan perancangan sistem tanpa mencakup perencanaan anggaran maupun implementasi sistem. Hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan rancangan sistem yang menjadi dasar pengembangan sistem publikasi dan realisasi anggaran dana desa yang lebih transparan, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sistem Informasi

Sistem dapat diartikan sebagai sekumpulan komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan informasi merupakan data yang telah diolah sehingga memiliki makna dan nilai guna bagi penggunaannya [5]. Sistem informasi merupakan integrasi antara manusia, perangkat keras, perangkat lunak, data, dan prosedur yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan informasi guna mendukung proses pengambilan keputusan, koordinasi, pengendalian, dan analisis dalam suatu organisasi [6]. Dalam konteks pemerintahan desa, sistem informasi berperan penting sebagai sarana pendukung transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelayanan publik.

2.2. Transparansi dan Publikasi Dana Desa

Transparansi dana desa merupakan prinsip keterbukaan pemerintah desa dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait pengelolaan keuangan desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban [3]. Penerapan transparansi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah, termasuk pemerintah desa, untuk menyediakan informasi publik secara terbuka dan mudah diakses [7]. Selain itu, pengelolaan keuangan desa juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa keuangan desa harus dikelola secara transparan dan akuntabel [8].

Menurut Mardiasmo, transparansi merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi mengenai pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang berkepentingan [9]. Publikasi anggaran Dana Desa, khususnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), menjadi instrumen penting dalam mewujudkan akuntabilitas serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa [10].

2.3. Perancangan Sistem dan Analisis Kebutuhan

Perancangan sistem merupakan tahapan dalam pengembangan sistem yang bertujuan untuk merancang dan menentukan bagaimana sistem baru akan dibangun agar mampu memenuhi kebutuhan pengguna. Proses ini mencakup perancangan alur proses, data, perangkat keras, perangkat lunak, serta aktivitas yang mendukung berjalannya sistem secara optimal [11]. Menurut Mulyani, perancangan sistem bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai sistem yang akan dikembangkan agar sesuai dengan kebutuhan pemakai [12].

Analisis kebutuhan merupakan proses untuk mengidentifikasi dan merumuskan kebutuhan pengguna serta kebutuhan sistem secara menyeluruh. Analisis ini terbagi menjadi analisis kebutuhan pengguna dan analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan pengguna berfokus pada evaluasi sistem yang sedang berjalan untuk mengidentifikasi permasalahan, sedangkan analisis kebutuhan sistem bertujuan memastikan sistem yang dirancang mampu memenuhi kebutuhan pengolahan dan penyajian informasi secara efektif [13].

2.4. Pemodelan Sistem: Flowchart, DFD, dan ERD

Flowchart merupakan representasi visual yang digunakan untuk menggambarkan alur proses atau logika sistem secara sistematis. Penggunaan flowchart memudahkan pengembang dalam memahami struktur sistem serta mengidentifikasi potensi ketidakefisienan dalam proses [14].

Data Flow Diagram (DFD) digunakan untuk menggambarkan aliran data dalam suatu sistem, termasuk proses, entitas eksternal, dan penyimpanan data. DFD membantu dalam memvisualisasikan bagaimana data mengalir dan diproses tanpa mempertimbangkan aspek fisik sistem [15].

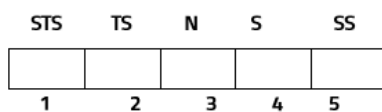
Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan model konseptual yang digunakan untuk menggambarkan struktur basis data, termasuk entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. ERD berfungsi sebagai dasar perancangan database agar sesuai

dengan kebutuhan sistem dan memudahkan pengelolaan data [16]

2.5. User Interface, Figma, dan System Usability Scale (SUS)

User Interface (UI) merupakan bagian dari sistem yang memungkinkan pengguna berinteraksi secara langsung dengan aplikasi. Desain UI yang baik berperan penting dalam meningkatkan kemudahan penggunaan dan pengalaman pengguna [17]. Dalam penelitian ini, perancangan UI dilakukan menggunakan Figma, yaitu aplikasi desain berbasis web yang mendukung kolaborasi real-time dan pembuatan prototipe antarmuka secara efisien [18].

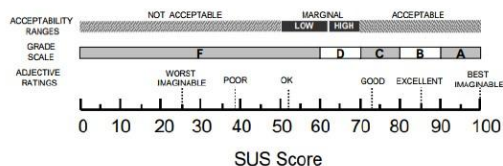
Evaluasi usability sistem dilakukan menggunakan System Usability Scale (SUS), yaitu metode pengukuran usability yang dikembangkan oleh John Brooke. Usability merupakan proses optimasi interaksi antara pengguna dan sistem agar pengguna dapat memperoleh informasi secara tepat serta menyelesaikan aktivitas secara efektif, efisien, dan memuaskan. Prinsip ini menjadi aspek penting dalam pengembangan sistem informasi publik, termasuk sistem informasi desa berbasis web [19]. SUS terdiri dari sepuluh pernyataan dengan skala penilaian 1–5 yang digunakan untuk mengukur persepsi pengguna terhadap kemudahan penggunaan sistem [20].



Gambar 1. Skala System Usability Scale (SUS)

Keterangan

Jawaban	Skor
Sangat tidak setuju (STS)	1
Tidak setuju (TS)	2
Netral (N)	3
Setuju (S)	4
Sangat setuju (ST)	5



Gambar 2. Skala Interpretasi Skor SUS

Sangat setuju (ST) 5Skor SUS berada pada rentang 0–100, di mana nilai di atas 68 dikategorikan sebagai sistem yang dapat diterima dan memiliki tingkat usability yang baik, sedangkan nilai di bawah 68 menunjukkan perlunya perbaikan system [21].

2.6. Penelitian Terdahulu (State of the Art)

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi berbasis web dengan metode prototype mampu meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan dana desa. Penelitian oleh Dwiyantri dan Suryani membuktikan

bahwa sistem publikasi dan realisasi anggaran desa dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi keuangan desa. Penelitian lain oleh Haris, Asa, dan Latuconsina juga menunjukkan bahwa metode prototype efektif digunakan dalam pengembangan sistem informasi desa karena bersifat fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan pengguna.

Berdasarkan kajian tersebut, penelitian ini menggunakan metode prototype untuk merancang sistem informasi publikasi dan realisasi anggaran dana desa yang berfokus pada peningkatan transparansi, kemudahan akses informasi, serta keterlibatan masyarakat, dengan keterbaruan terletak pada studi kasus dan rancangan sistem yang dihasilkan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus pada analisis dan perancangan sistem informasi publikasi dan realisasi anggaran dana desa di Desa Abiansemal. Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode prototype, karena metode ini bersifat iteratif dan memungkinkan keterlibatan pengguna secara langsung dalam proses perancangan sistem.

3.1. Metode Prototype

Metode prototype merupakan pendekatan pengembangan sistem di mana pengembang membuat versi awal dari sistem (prototipe) sebagai sarana komunikasi untuk memperoleh umpan balik dari pengguna, sehingga kebutuhan sistem dapat dipahami secara lebih jelas, terutama ketika kebutuhan belum terdefinisi secara lengkap sejak awal [20]. Prototipe yang dikembangkan menggambarkan fungsi utama dan tampilan sistem, kemudian dievaluasi secara berulang untuk dilakukan perbaikan hingga sesuai dengan kebutuhan pengguna [22]

Metode prototype dipilih karena memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi, mampu mengurangi risiko kegagalan pengembangan sistem, serta sesuai untuk sistem dengan kebutuhan yang dinamis dan belum sepenuhnya jelas pada tahap awal perancangan. Umpan balik pengguna yang diperoleh sejak tahap awal memungkinkan penyesuaian sistem dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.



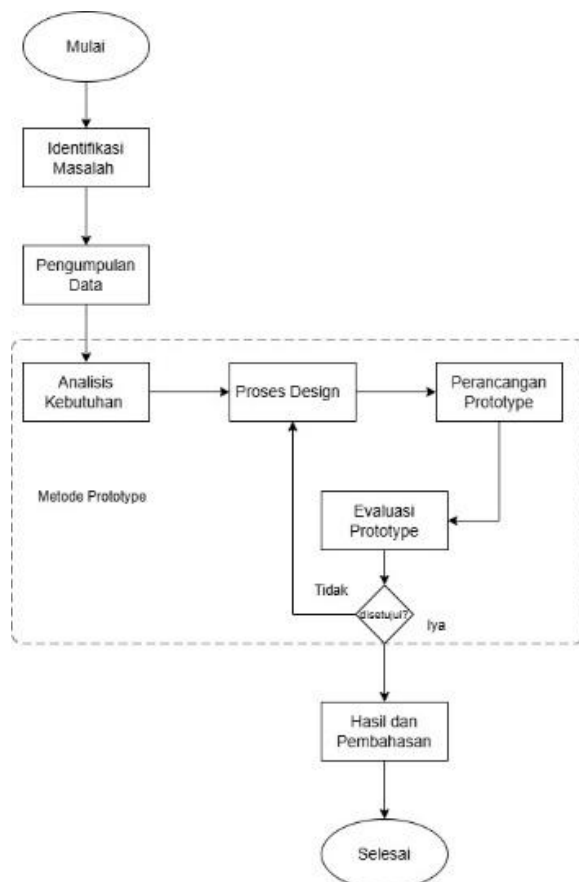
Gambar 3. Metode Prototype

Tahapan dalam metode prototype meliputi identifikasi kebutuhan, perancangan sistem, pembangunan prototipe, evaluasi dan perbaikan, hingga sistem dinyatakan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan dengan permasalahan penelitian. Teknik yang digunakan meliputi:

- Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap proses publikasi dan realisasi anggaran desa yang sedang berjalan, termasuk media publikasi yang digunakan serta tingkat aksesibilitas informasi bagi masyarakat.
- Wawancara, dilakukan secara tidak terstruktur dengan kepala desa dan kepala urusan keuangan untuk menggali informasi terkait alur publikasi dan realisasi anggaran dana desa serta permasalahan yang dihadapi.
- Studi literatur, dilakukan dengan menelaah buku, jurnal ilmiah, dan referensi lain yang relevan dengan analisis dan perancangan sistem informasi publikasi anggaran desa.



Gambar 4. Alur Penelitian

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Data tersebut mencakup informasi mengenai struktur organisasi desa, alur publikasi anggaran, serta kendala yang dihadapi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari Desa Abiansemal melalui

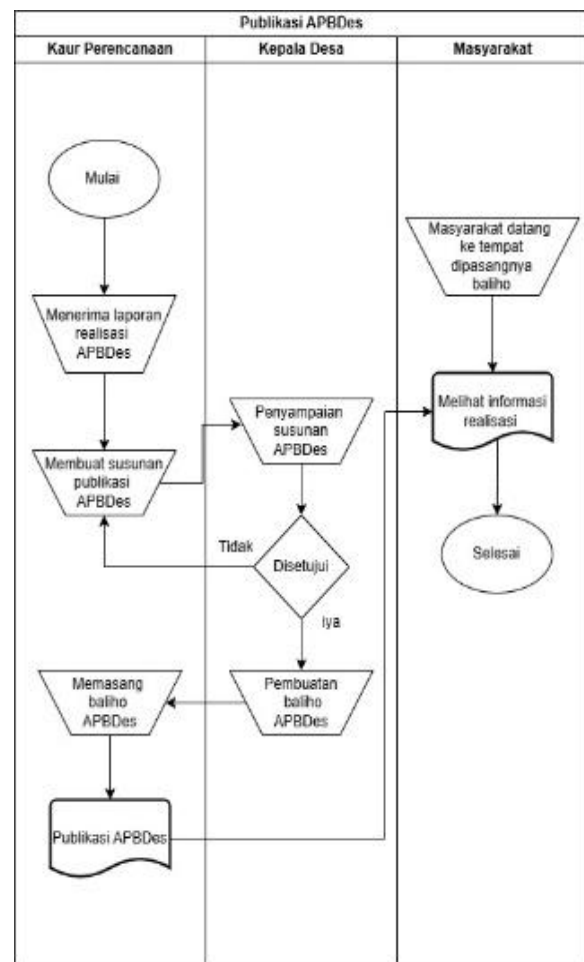
observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder berasal dari literatur, buku, dan jurnal ilmiah yang digunakan untuk memperkuat landasan teoritis penelitian.

3.4. Alur Penelitian

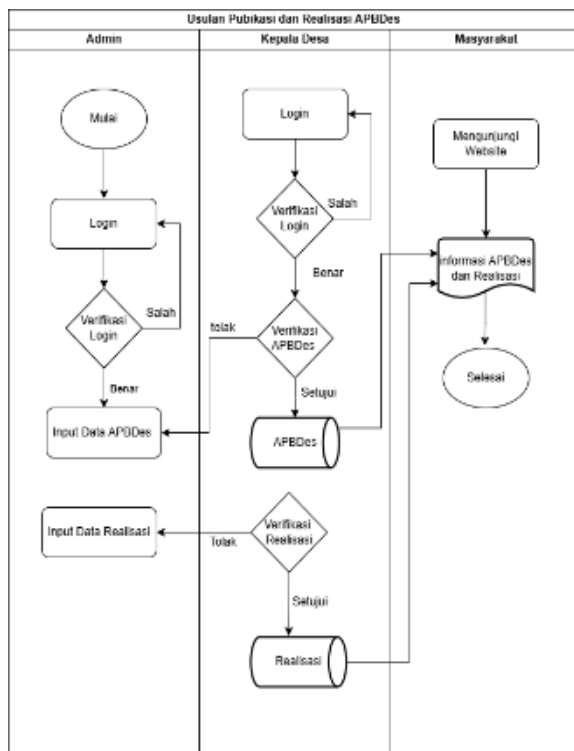
Alur penelitian dimulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis kebutuhan, perancangan sistem, pembangunan prototipe, evaluasi menggunakan System Usability Scale (SUS), hingga penyusunan hasil dan pembahasan. Evaluasi usability dilakukan dengan melibatkan sepuluh responden yang terdiri dari aparatur desa, dengan kriteria kelayakan sistem ditentukan berdasarkan nilai SUS di atas 68

3.5. Perancangan Sistem

Perancangan sistem dilakukan berdasarkan hasil analisis sistem yang sedang berjalan, di mana publikasi anggaran masih dilakukan secara manual melalui media cetak. Sistem usulan dirancang untuk meningkatkan efektivitas penyampaian informasi kepada masyarakat melalui sistem berbasis web. Komponen perancangan sistem meliputi Flowchart, Data Flow Diagram (DFD), Entity Relationship Diagram (ERD), relasi antar tabel, serta perancangan antarmuka pengguna (UI) menggunakan Figma.



Gambar 5. Publikasi yang Sedang Berjalan



Gambar 6. Sistem Usulan Publikasi dan Realisasi

Sistem usulan memungkinkan admin melakukan input data APBDes dan realisasi anggaran, yang selanjutnya diverifikasi oleh kepala desa sebelum dipublikasikan kepada masyarakat. Informasi yang telah disetujui dapat diakses secara daring sebagai bentuk penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kondisi Pengelolaan dan Publikasi Anggaran Desa Abiansema

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Abiansema telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya melalui mekanisme musyawarah desa yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat. Namun, pada aspek publikasi dan realisasi anggaran, sistem yang berjalan masih bersifat konvensional, yaitu melalui baliho dan papan pengumuman di kantor desa. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan akses informasi, terutama bagi masyarakat yang berada di luar wilayah desa, serta berpotensi menimbulkan keterlambatan dalam penyampaian informasi anggaran.

4.2. Identifikasi Kebutuhan Sistem

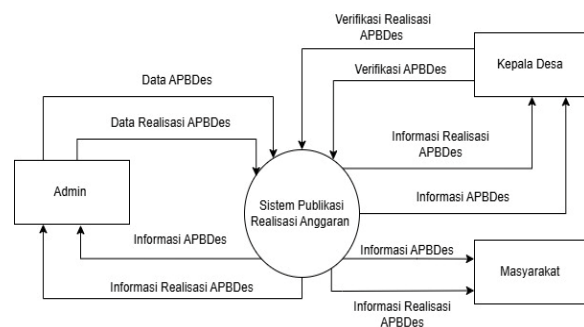
Berdasarkan analisis sistem yang berjalan, ditemukan beberapa permasalahan utama, yaitu keterlambatan penyampaian informasi, keterbatasan media publikasi, dan rendahnya efisiensi akses informasi. Oleh karena itu, dirumuskan kebutuhan sistem berupa sistem informasi publikasi dan realisasi

anggaran berbasis web yang memungkinkan perangkat desa mengunggah data secara cepat dan masyarakat mengakses informasi secara real-time.

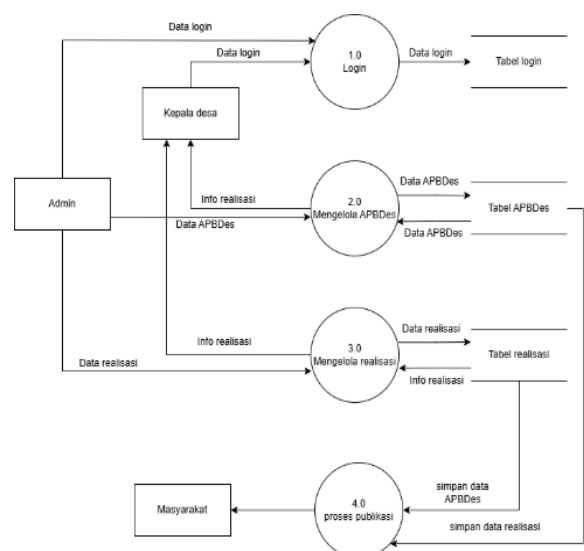
Kebutuhan fungsional sistem meliputi kemampuan menampilkan data APBDes dan realisasi APBDes, serta fitur input dan pembaruan data oleh admin yang selanjutnya diverifikasi oleh kepala desa sebelum dipublikasikan. Sementara itu, kebutuhan nonfungsional mencakup pembagian peran pengguna, yaitu admin sebagai pengelola data, kepala desa sebagai pihak verifikator, dan masyarakat sebagai pengguna akhir yang mengakses informasi anggaran.

4.3. Hasil Perancangan Sistem

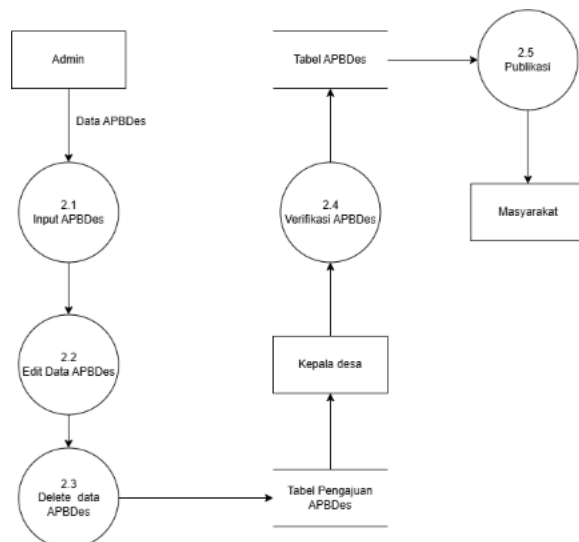
Hasil penelitian berupa rancangan sistem informasi publikasi dan realisasi anggaran desa yang disusun menggunakan pemodelan sistem dan perancangan antarmuka. Pemodelan sistem meliputi diagram konteks, Data Flow Diagram (DFD), Entity Relationship Diagram (ERD), serta relasi antar tabel yang menggambarkan alur pengelolaan data dari tahap input, verifikasi, hingga publikasi.



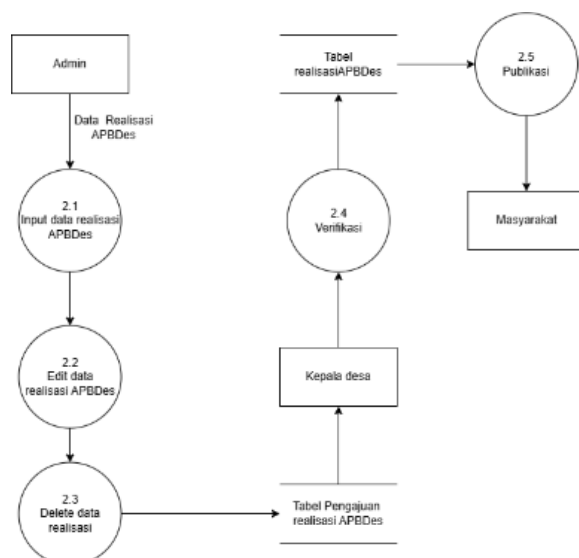
Gambar 7. Diagram Konteks Sistem Publikasi Realisasi APBDes



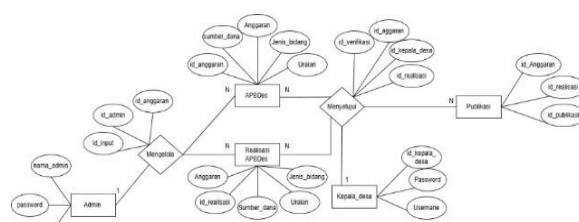
Gambar 8. DFD Level 1 Sistem Publikasi Realisasi APBDes



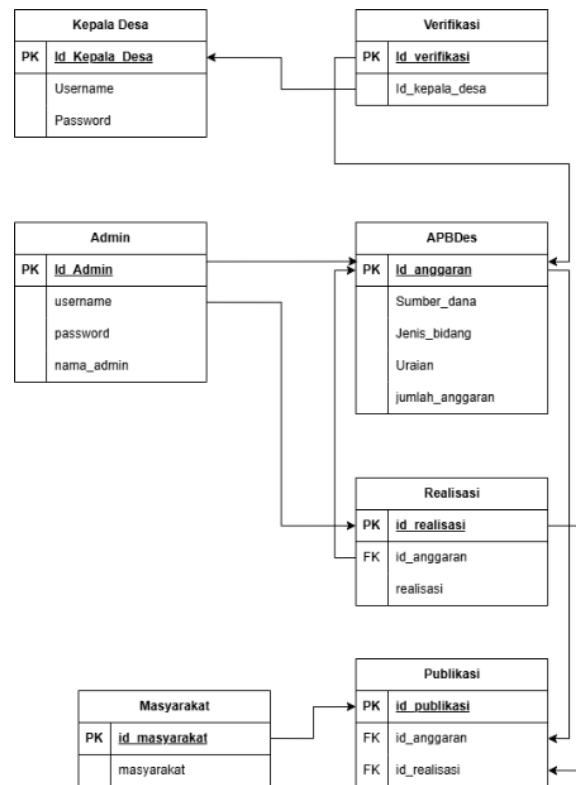
Gambar 9. DFD Level 2 Proses 1 Kelola Realisasi APBDes



Gambar 10. DFD Level 2 Proses 2 Realisasi APBDES



Gambar 11. Entity Relationship Diagram (ERD)

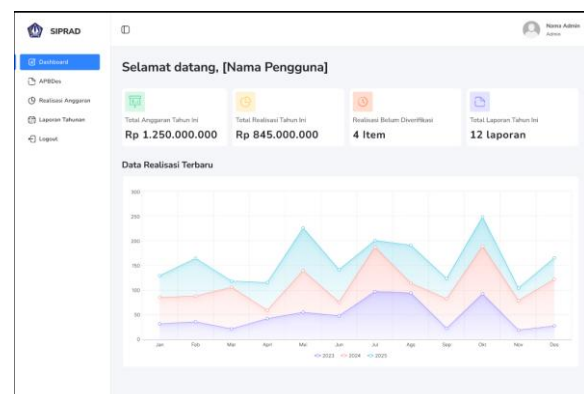


Gambar 12. Relasi Antar Tabel

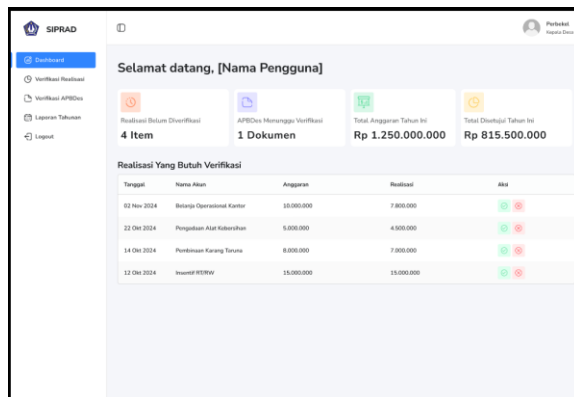
Selain itu, perancangan antarmuka pengguna (user interface) menghasilkan rancangan halaman login, dashboard admin dan kepala desa, halaman pengelolaan APBDes dan realisasi, serta halaman publikasi yang dapat diakses oleh masyarakat.



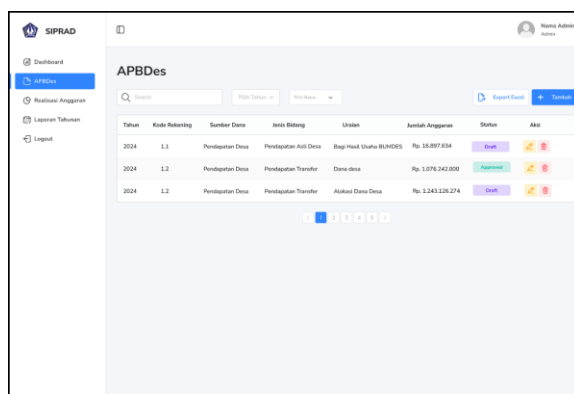
Gambar 13. Perancangan Antar Muka



Gambar 14. Dashboard Admin



Gambar 15. Dashboard Kepala Desa



Gambar 16. Tampilan APDES Admin

4.4. Hasil Evaluasi Usability Sistem

Evaluasi usability sistem dilakukan menggunakan metode System Usability Scale (SUS) dengan melibatkan sepuluh responden yang terdiri dari perangkat desa dan masyarakat. Pada pengujian tahap pertama, diperoleh skor rata-rata SUS sebesar 50, yang termasuk kategori not acceptable. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem masih memiliki kelemahan pada aspek kemudahan penggunaan, konsistensi antarmuka, dan kejelasan alur navigasi.

Setelah dilakukan perbaikan desain secara iteratif, pengujian tahap kedua menghasilkan skor rata-rata SUS sebesar 82. Nilai ini berada pada kategori acceptable dengan grade B dan adjective rating good, yang menunjukkan bahwa sistem telah memiliki tingkat usability yang baik dan layak digunakan sebagai dasar pengembangan ke tahap implementasi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses publikasi dan realisasi anggaran dana desa di Desa Abiansema yang masih dilakukan secara manual menyebabkan keterbatasan akses informasi, khususnya bagi masyarakat yang berada di luar wilayah desa. Melalui penerapan metode prototype, penelitian ini menghasilkan rancangan sistem informasi publikasi dan realisasi APBDes yang mencakup pemodelan proses, struktur basis data, serta rancangan antarmuka pengguna dengan tiga aktor utama, yaitu admin, kepala desa, dan masyarakat, yang mendukung proses input, verifikasi, dan publikasi

anggaran secara lebih cepat, efisien, dan transparan. Hasil evaluasi usability menggunakan System Usability Scale (SUS) menunjukkan skor rata-rata sebesar 82, yang berada pada kategori acceptable dengan grade B, sehingga sistem dinilai layak digunakan sebagai dasar pengembangan ke tahap implementasi. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengimplementasikan dan mengembangkan sistem ini pada desa lain, menambahkan fitur notifikasi publik dan visualisasi data anggaran, mengintegrasikan sistem dengan aplikasi pemerintahan desa lainnya, mengoptimalkan tampilan responsif untuk perangkat mobile, serta memperkuat aspek keamanan sistem guna meningkatkan perlindungan data dan kepercayaan pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] I. Althof, *Quo vadis penambahan masa jabatan kepala desa pasca terbitnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Desa*, 2023.
- [2] A. Affandi, "Pengelolaan dana desa dan dampaknya terhadap indeks desa membangun di Nusa Tenggara Timur," *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, vol. 4, no. 1, pp. 51–71, 2023, doi: 10.33105/jmp.v4i1.486.
- [3] A. Karpriana, "Transparansi dana desa sebagai faktor penting dalam mewujudkan *good governance* dan akuntabilitas," 2024, doi: 10.30738/ad.v8i2.
- [4] A. Putra et al., "Sistem informasi pengelolaan dana desa," 2020.
- [5] R. Maydianto, "Pendapat ahli mengenai sistem informasi manajemen," 2021.
- [6] I. Syamsi, *Sistem Informasi Manajemen*, 2014.
- [7] A. Pratama et al., "Keterbukaan informasi publik dalam pemerintahan desa," 2021.
- [8] S. I. Hanifah, "Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban APBDes," 2015.
- [9] Erhan, "Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja sekolah terhadap kinerja guru," 2019.
- [10] E. M. Rini, D. Yusuf, A. P. Utomo, E. S. Haq, and F. Panduardi, "Penerapan aplikasi monitoring kegiatan desa," *JPP IPTEK*, vol. 8, no. 1, pp. 47–54, 2024, doi: 10.31284/j.jpp-iptek.2024.v8i1.5275.
- [11] H. Nopriandi, "Perancangan sistem informasi registrasi mahasiswa," 2018.
- [12] I. A. Fauzi and A. Mulyani, "Perancangan sistem informasi kuliner berbasis web," 2017.
- [13] R. Karmila Sari, "Analisis kebutuhan pembelajaran bahasa Inggris pada mahasiswa kelas karyawan," 2019.
- [14] Rosaly and Prasetyo, "Pengertian *flowchart* beserta fungsi dan simbol-simbolnya," 2019.
- [15] F. Soufitri, "Perancangan *data flow diagram* untuk sistem informasi sekolah," 2020.
- [16] Ivananda, Samaji, and Yanuar, "Aplikasi perhitungan pendapatan dan pajak restoran berbasis web," 2015.

- [17] Gana and Swandi, “Warna dan prinsip desain *user interface* (UI) dalam aplikasi seluler,” 2020.
- [18] Multazam, Paputungan, and Suranto, “Perancangan *user interface* dan *user experience* menggunakan Figma,” 2023.
- [19] N. W. Utami, I. K. R. Arthana, and I. G. M. Darmawiguna, “Usability testing pada sistem informasi,” 2020.
- [20] Welda and U. Putra, “Usability testing website menggunakan *System Usability Scale* (SUS),” *International Journal of Natural Science and Engineering*, vol. 4, no. 3, pp. 152–161, 2020, doi: 10.23887/ijnse.v4i2.28864.
- [21] DwiYanti, “Analisis dan perancangan aplikasi sistem publikasi realisasi anggaran desa,” 2020.
- [22] A. Damanik and R. Ramadhan, “Perancangan prototyping aplikasi tambal ban online (NAMBAL) berbasis mobile,” *Jurnal Ilmiah Sains dan Teknologi*, vol. 8, no. 2, 2024.